

**PENYEMPURNAAN
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2023**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
JLN. ILE LEWOTOLOK TELP. / FAX. (0383) 21240 - 86218**

LARANTUKA

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta tuntunan-Nya, sehingga penyusunan Penyempurnaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan..

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2023 mempunyai arti strategis karena hal ini merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ketahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategi setelah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2023, terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan, Rencana Kerja pada tahun lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur, Dana Indikatif berserta sumbernya serta Prakiraan Maju berdasarkan Pagu Indikatif, Sumber Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan Program dan Kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tahun 2023 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tahun 2023 ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan. Semoga Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur ini dapat mencerminkan kinerja kesinambungan Program & Kegiatan BKPSDMD Kabupaten Flores Timur tahun 2023

Larantuka, Oktober 2022
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Flores Timur,

Rufus Koda Teluma, S.Sos
Pemimpin Utama Muda
NIP. 196907251997031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTARTABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 .Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangka Daerah Tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah...	19
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023	20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	32
3.1. Telah Terhadap Kebijakan Nasional.....	32
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	33
3.3. Program dan Kegiatan	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2023	36
BAB V PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022	7
Tabel II.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
Tabel II.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023	22
Tabel III.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDMD.....	33
Tabel III.3. Perumusan rencana Program dan Kegiatan perangkat Daerah tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.....	35
Tabel IV.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023	37

BAB I

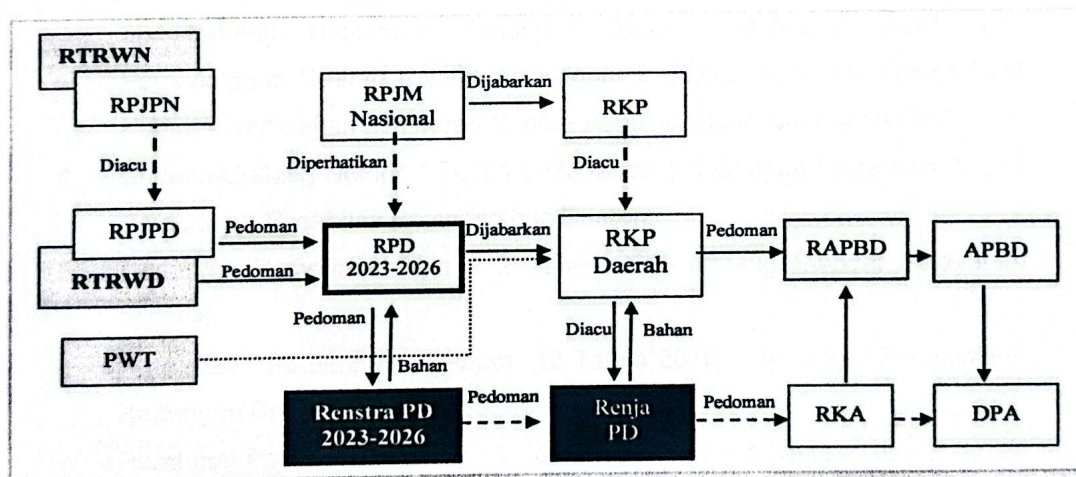
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan, *stakeholder* lain dan masyarakat. Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra). Dokumen-dokumen ini menjadi salah satu acuan dalam menyusun rencana kerja organisasi perangkat daerah.

Rencana kerja tahunan organisasi Perangkat Daerah atau disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Gambar 1.1 Hubungan antara Renja PD Tahun 2023 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



Dalam penyusunan Renja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Rencana Kerja OPD berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program/kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju.

Begitu pula Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan dalam penyusunannya mengacu pada RKPD. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagai bahan masukan untuk penyusunan RKA-OPD (Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah) yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan DPA-OPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran- Organisasi Perangkat Daerah).

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
21. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur.
22. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur periode 2023-2026
23. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran yang merupakan penjabaran Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Sedangkan tujuannya penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2023 adalah :

- a. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD serta memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.
- b. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur.
- c. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan pengendalian serta evaluasi kinerja tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

BAB.II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Meliputi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB.III : TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

meliputi: Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan

BAB.IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB.V : PENUTUP

Berisikan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam pelaksanaan dan ketersediaan anggaran, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB. II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan dokumen Renja Tahun 2023 perlu dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun 2021 sebagaimana digambarkan pada Tabel II.1 berikut:

**Tabel II.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Flores Timur**

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

No	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/ KEGIATAN(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5-3	5-4	0-0	0-0	01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH									
	x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupante/Kota	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran(%)						100		
	x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupante/Kota	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran(%)						100		
							Jumlah sarana prasarana aparatur yang tingkatkan (%)						100		
							Jumlah Aparatur OPD yang ditingkatkan Kapasitasnya (orang)								
							Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja (OPD)						7		
	x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)								

No	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/ KEGIATAN(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan keuangan OPD (Dokumen)	35	21	7	7	100	7	35	100
	x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0	0	14	14	100	14	28	#DIV/0!
	x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	tersedianya pelayanan jasa administrasi keuangan (orang)	30	18	6	6	100	6	30	100
	x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi								
	x	xx	01	2.05		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat teknis fungsional (orang)	28	23	2	2	100,00	2	27	96,43
	x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	x	xx	01	2.06	01	Peyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen listrik dan penerangan (jenis)	54	15	4	4	100	7	26	48,15

No	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/ KEGIATAN(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersediannya perlengkapan gedung kantor (unit)	12	2	5	0	0	5	7	58,33
							tersediannya peralatan gedung kantor (unit)	24	9	2	0	0	3	12	50,00
	x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersediannya jasa kebersihan kantor (jenis)	87	57	14	14	100	22	93	106,90
							tersediannya alat tulis kantor (jenis)	184	96	29	29	100	35	160	86,96
	x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersediannya barang cetak dan penggandaan(lembar)	590.000	212.375	75.000	75000	100	70.000	357.375	60,57
	x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan(jenis/ bulan)	10	6	2	2	100	2	10	100,00
	x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersediannya makan dan minum (porsi)	2700	745	600	250	41,67	165	1.160	42,96
	x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tersediannya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah (kali)	251	74	36	51	141,67	52	177	70,52
	x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								-	
	x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	tersediannya meja dan kursi yang memadai (unit)	86	31	20	0	0	10	41	47,67

No	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/ KEGIATAN/(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah administrasi surat menyurat (lembar)	3500	1362	150	150	100	500	2.012	57,49
	x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik (bulan)	60	36	12	12	100	12	60	100,00
	x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga/jasa pendukung dan teknis perkantoran (orang)	1	1	1	1	100	1	3	300,00
	x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang difasilitasi jasa perizinan (unit)	8	8	6	6	100	5	19	237,50
							Jumlah kendaraan dinas operasional kantor yang dipelihara (unit)	8	8	1	1	100	1	10	125,00
	x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor (unit)	2	2	2	1	50	1	4	200
	x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	90	90	6	6	100	7	103	114,44

No	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/ KEGIATAN/(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (unit)	29	30	5	5	100	5	40	137,93
	5	03				Kepegawalan									
	5	03	02			Program Kepegawalan Daerah	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur(%)						100		#DIV/0!
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawalan ASN								-	
	5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Penerimaan CPNS (pelamar)	7500	4605	3.919	3.751	95,71	3000	11.356	151,41
							Jumlah rencana formasi pegawai dan pemetaan jabatan yang disusun (formasi)	2681	386	400	-	0	300	686	25,59
							Jumlah pengangkatan CPNS (orang)	2681	283	250	-	0	300	583	21,75
							Jumlah pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (orang)	-	-	112	-	0	112	112	#DIV/0!
							jumlah PNS yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan OPD (orang)	800	-	-	-	#DIV/0!	300	300	37,50

No	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/ KEGIATAN/(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Penataan sistem aparatur purnabhakti/pensiunm(orang)	800	583	150	205	136,67	150	938	117,25
	5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	pengumpulan,pengolahan dan penyajian data informasi kepegawaian (file)	28.000	10.213	6100	4714	77,28	5800	20.727	74,03
							Tersedianya 1 aplikasi kepegawaian (aplikasi)	1	1	1	1	100	1	3	300
	5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah sistem informasi administrasi proses penyesuaian karpeg taspen karis karsu (kartu)	2535	2132	400	629	157,25	500	3.261	128,64
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN									
	5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	14550	4105	2790	2237	80,18	2380	8.722	59,95
	5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen penyusunan rencana pembinaan karir (orang/dok)	1781	1477	206	183	88,83	300	1.960	110,05
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN									
	5	03	02	2.03	1	Peningkatan kapasitas ASN	Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional (orang)	400	0	0	0	#DIV/0!	6	6	1,50
	5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Ujian dinas dan penyesuaian ljasah (orang)	620	312	100	118	118	100	530	85,48

No	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/ KEGIATAN/(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	03	02	2.03	04		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	pemberian bantuan tubel dan ibel dan ikatan dinas (orang)	335	115	100	84	84,0	50	249	74,33
5	03	02	2.03	13		Pembinaan jabatan fungsional ASN	tercapainya penempatan pengangkatan/ inpasing/ perpindahan jabatan fungsional (berkas)	-	-	-	-	#DIV/0!	500	500	#DIV/0!
5	03	02	2.04			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
5	03	02	2.04	04		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi (orang)	45	9	10	19	190,00	20	48	106,67
5	03	02	2.04	08		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS (kasus)	90	67	20	22	110,0	20	109	121,11
5	04					Pendidikan dan Pelatihan									
5	04	02				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (%)								
5	04	02	2.02			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional									

No	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/ KEGIATAN/(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	5	04	02	2.02	04	Pengelolaan kelembagaan tenaga pembembang kompensasi dan sumber belajar	Terlaksananya rapat koordinasi tingkat kepegawaian (orang)	580	66	0	0	#DIV/0!	60	126	21,72
							Jumlah PNS pengelola kepegawaian yang memahami kebutuhan diklat di OPD masing-masing(orang)	240	-	-	-	#DIV/0!	60	60	25,00
							Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi aturan kepegawaian bagi PNS (kecamatan)	19	0	0	0	#DIV/0!	19	19	100,00
	5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah jabatan fungsional kepemimpinan dan parajabatan	Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan II dan III (CPNS)	646	397	54	54	100	300	751	116,25
	5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pembembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja Sama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Penyelenggaraan diklat teknis Fungsional dan kepemimpinan (orang)	445	51	6	6	100	6	63	14,16

Dari Tabel II.1 terlihat bahwa pada Realisasi Program / kegiatan sangat variatif ada yang tidak memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan tetapi ada program ataupun kegiatan yang telah memenuhi target hasil/keluaran dan dapat dijelaskan secara umum sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Kisaran Persentase Capaian Kinerja dari 42,96 % sampai dengan 300 % .Capaian persentase terendah yaitu pada kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan persentase capaian tertinggi pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor. Faktor Penyebab tidak tercapainya target kinerja program yaitu alokasi anggaran yang belum memadai atau dapat juga di pengaruhi oleh efisiensi penggunaan yang baik sehingga terjadi penghematan yang berdampak pada tidak terelisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan. Adapun faktor yang mempengaruhi tercapainya , terpenuhinya target kinerja program bahkan melebihi target adalah tentu alokasi anggaran yang sudah cukup memadai dan juga optimalisasi sumber daya yang ada untuk mempercepat Realisasi capaian program atau kegiatan dimaksud.
2. Program Kepegawaian Daerah yang tingkat capainnya terendah adalah pada kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN sub kegiatan Peningkatan Kapasitas ASN dengan indikator Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional (orang) dalam target Renstra 2017 s/d 2022 sebanyak 400 orang tetapi tingkat capaian realisasi target rentra sebesar 1,50 %, hal ini dapat dijelaskan bahwa terhadap kegiatan tersebut diatas tidak pernah di jalankan/direalisasikan karena keterbatasan anggaran sehingga tidak mendapat alokasi anggaran setiap tahunnya. Adapun kegiatan yang telah mencapai target diantaranya kegiatan Pengadaan Pemberhentian dan informasi Kepegawaian ASN sub kegiatan penyusunan rencana kebutuhan jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN terutama pada indikator Jumlah Penerimaan CPNS (pelamar) dari target Renstra 2017 s/d 2022 sebanyak 7500 pelamar terealisasi sampai dengan tahun 2022 sebesar 11.356 pelamar atau sebesar 151,41 %. Faktor yang cukup mempengaruhi tingkat capaian pada kegiatan ini adalah cukup tersedianya formasi yang dibutuhkan, ketersediaan akses informasi yang memadai, transparansi dalam pelaksanaan proses pengadaanya, juga dukungan anggaran yang cukup

memadai. Secara umum untuk Program kepegawaian Daerah telah mencapai target kinerja bahkan ada yang melebihi target.

3. Untuk program Pengembangan Sumber Daya Manusia, berdasarkan data dari tabel II.1 diatas terlihat bahwa kegiatan yang masih rendah capaiannya adalah pada sub kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi pengelolaan sumber belajar dan kerja sama serta pengembangan kompetensi pimpinan Daerah, jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan dengan indikator Penyelenggaraan diklat teknis Fungsional dan kepemimpinan(orang) sebesar 14,16 % atau 63 orang dari target Renstra 2017 - 2022 sebanyak 445 orang. Hal ini di pengaruhi oleh keterbatasan ketersediaan anggaran setiap tahunnya, sehingga mempengaruhi jumlah atau kuota yang diusulkan untuk mengikuti diklat. Sedangkan untuk kegiatan yang telah mencapai target bahkan telah melebihi target adalah kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan fungsional kepemimpinan dan prajabatan dengan indikator Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan II dan III (CPNS) dari target 646 orang terealisasi 751 atau 116,25%. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan ini adalah Jumlah Persentase yang lulus seleksi CPNS setiap tahun cukup banyak sesuai usulan formasi serta dukungan ketersediaan anggaran yang cukup memadai.

Dari uraian capaian program/kegiatan diatas, terhadap capaian program/kegiatan yang belum mencapai target harus menjadi perhatian dan prioritas dalam pelaksanaan program di tahun-tahun berikutnya, untuk itu kebijakan /tindakan perencanaan dan penganggaran juga harus mengikuti program/kegiatan prioritas yang belum mencapai target seperti yang termuat didalam Renstra OPD.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada tabel II.2 berikut ini.

TABEL II.2.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BKPSDMD KABUPATEN FLORES TIMUR

NO	INDIKATOR	SPM/Stan dar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10	11	(12)	(13)
1	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	√	3,29	3,48	63,16	68,42	57,89		63,16	68,42	Realisasi capaian cukup baik didukung dari ketersediaan anggaran yang cukup memadai
2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	-	√	53,13	58,53	14,68	18,45			14,68	18,45	Realisasi capaian nol (tidak ada) karena tidak tersedianya alokasi anggaran untuk kegiatan ini setiap tahunnya.
3	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	-	√	35	35	36	36	35		36	36	Realisasi capaian baik (telah mencapai target) didukung dari ketersediaan anggaran yang cukup dan dukungan SDM yang memadai
4	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	-	√	2.102	2.102	0	0	2.000				Sesungguhnya ada realisasi capaian pada tahun 2021
5	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah	-	√	3.178	3.178	3.233	3.318	2.975		3.233	3.318	Realisasi capaian cukup baik

6	Rata-rata lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	-	√	3				3		3		Realisasi capaian cukup baik
---	---	---	---	---	--	--	--	---	--	---	--	------------------------------

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah diatas menunjukkan beberapa indikator telah mencapai target dan beberapa indikator lainnya belum mencapai target. Adapaun faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah adalah sebagai berikut:

a) Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten menjadi faktor yang mendukung kinerja. Di Kabupaten Flores Timur ketersediaan sumber daya yang berkompeten belum mencukupi sehingga menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja.

b) Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan sesuai standar menjadi faktor pendukung kinerja. Di Kabupaten Flores Timur ketersediaan sarana dan prasarana belum lengkap dan sesuai standar sehingga menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja.

c) Kerjasama Lintas Sektor

Pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah membutuhkan peran serta lintas sektor. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tidak mampu menyelesaikan sendiri permasalahan yang terjadi.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Dari evaluasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagian sudah tercapai dan sebagian belum tercapai seperti terlihat dalam indikator kinerja pada tabel II.2 diatas. Indikator kinerja Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal realisasi sebesar 57,89 % dari target ditahun 2021 sebesar 3,29 %. Pencapaian target pada Indikator Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dari target 35 % terealisasi juga sebesar 35 %, hal ini menunjukan tingkat capain yang baik. Hal ini dipengaruhi oleh Efisiensi atas ketersediaan Anggaran dan Sumber Daya Manusia pada BKPSDM yang cukup memahami pelaksanaan kegiatan ini. Sedangkan indikator Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah masih

sangat rendah capaiannya, demikian juga dengan indikator rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan juga terlihat capainnya masih rendah. Dengan melihat capaian kinerja diatas maka dapat diketahui hal kritis/permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dan isu strategis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur yaitu ;

1. Masih rendahnya ASN yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan
2. Masih kurangnya Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah
3. Masih rendahnya ASN yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Struktural maupun Fungsional.
4. Kualitas SDM yang belum memadai atau Masih Kurangnya SDM yang memenuhi Kompetensi.
5. Pengadaan pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
6. Masih banyak jenis pelayanan yang belum menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut diatas, ada beberapa hambatan yang harus dihadapi, diantaranya adalah :

1. Masalah Kedisiplinan Kerja
2. Alokasi Anggaran yang belum memadai.
3. Kurang adanya bimbingan teknis atau pelatihan bagi ASN
4. Sarana dan Prasarana yang belum memenuhi standar yang dibutuhkan.
5. Kurang memahami Tugas pokok dan fungsi secara baik

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan program , kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan pada RKPD tahun 2023 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam rangka mencapai tujuan indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPD tahun 2023-2026. Secara garis besar program , kegiatan dan Sub Kegiatan relatif sama dengan tahun sebelumnya. Dalam penyusunan dokumen perencanaan program dan kegiatan disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jumlah anggaran dibandingkan dengan rancangan awal RKPD dimasing-masing program dan kegiatan telah menyesuaikan kebutuhan yang direncanakan.

Secara umum program kegiatan pada rancangan awal RKPD tahun 2023 sudah sesuai dengan analisis kebutuhan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Tetapi sedikit berbeda pada pagu indikatif Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai lebih besar dari pagu awal RKPD. Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel II.4.

Tabel II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

KODE						RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	xx	01	01	01		BADAN KEPEGAWAIAN DAN				6.586.128.048	BADAN KEPEGAWAIAN DAN				6.616.128.048
x	xx	01	01	01		Program Penunjang Urusan				3.638.128.048	Program Penunjang Urusan				3.668.128.048
x	xx	01	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupante/Kota		Presentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	3.638.128.048	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupante/Kota		Presentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	3.668.128.048
								Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100				Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	
								Presentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100				Presentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100	
								Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100				Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	
x	xx	01	2.01			Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)	7	107.500.000	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)	7	107.500.000
x	xx	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Larantuka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Larantuka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000
x	xx	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Larantuka	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Larantuka	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	15.000.000

					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7	60.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7	60.000.000
x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Larantuka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah (Laporan)	5	17.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat	Larantuka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah (Laporan)	5	17.500.000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)	26	3.037.550.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)	26	3.037.550.000
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Larantuka	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3	2.988.050.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Larantuka	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3	2.988.050.000
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Larantuka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	37.500.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan	Larantuka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	37.500.000
x	xx	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	12.000.000
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik			1	20.000.000	Administrasi Barang			1	20.000.000
x	xx	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Larantuka	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	10.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Larantuka	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	10.000.000

x	xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	10.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	10.000.000
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi	3	80.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi	3	90.000.000
x	xx	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dalam Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai(Dokumen)	3	20.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dalam Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai(Dokumen)	3	30.000.000
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Denpasar	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yg mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	30.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Denpasar	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yg mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	30.000.000
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Denpasar	Jumlah orang yg mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2	30.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Denpasar	Jumlah orang yg mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2	30.000.000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	38	216.800.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	38	216.800.000
x	xx	01	2.06	01	Peyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Larantuka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	1	5.000.000	Peyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Larantuka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	1	5.000.000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Larantuka	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	2	35.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Larantuka	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	2	35.000.000
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Larantuka	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga (Paket)	2	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Larantuka	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga (Paket)	2	15.000.000

x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Larantuka	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	1	30.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Larantuka	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	1	30.000.000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Larantuka	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	2	30.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Larantuka	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	2	30.000.000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Larantuka	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Dokumen)	2	1.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Larantuka	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Dokumen)	2	1.800.000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Larantuka	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Larantuka	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	70.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	70.000.000
x	xx	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4	15.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4	15.000.000
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	25	95.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	25	115.000.000
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Larantuka	Jumlah paket Mebel yang disediakan (Unit)	25	30.000.000	Pengadaan Mebel	Larantuka	Jumlah paket Mebel yang disediakan (Unit)	25	30.000.000
x	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Larantuka	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	2	10.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Larantuka	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	2	20.000.000
x	xx	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Larantuka	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan (Unit)	1	20.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Larantuka	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan (Unit)	1	20.000.000
x	xx	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	Larantuka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	25.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	Larantuka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	25.000.000

x	xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	10.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	20.000.000
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa			36	43.300.000	Penyediaan Jasa			36	43.300.000
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Larantuka	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12	2.700.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Larantuka	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12	2.700.000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan)	12	31.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan)	12	31.000.000
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Umum	Larantuka	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	9.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Umum	Larantuka	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	9.600.000
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		37.978.048	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		37.978.048
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Larantuka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	13.978.048	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Larantuka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	13.978.048
x	xx	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Larantuka	Jumlah Mebel yang dipelihara (Unit)	20	3.000.000	Pemeliharaan Mebel	Larantuka	Jumlah Mebel yang dipelihara (Unit)	20	3.000.000
x	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Larantuka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	2	3.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Larantuka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	2	3.000.000
x	xx	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Larantuka	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara (Unit)	1	3.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Larantuka	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara (Unit)	1	3.000.000

x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	4	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	4	5.000.000
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	2	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	2	5.000.000
5	03	02			Program Kepegawaian Daerah		Persentase ASN yang memiliki sertifikat fungsional sesuai jabatan (%)	14,68	1.520.000.000	Program Kepegawaian Daerah		Persentase ASN yang memiliki sertifikat fungsional sesuai jabatan (%)	14,68	1.520.000.000
5	03	02	2.0		Pengadaan,				545.000.00	Pengadaan,				545.000.00
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Larantuka, Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	5	30.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Larantuka, Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	5	30.000.000
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Larantuka, Denpasar, Jakarta	Jumlah Dokumen kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	2	400.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Larantuka, Denpasar, Jakarta	Jumlah Dokumen kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	2	400.000.000

					Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)				Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)			10.000.000
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Larantuka	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	15	10.000.000		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Larantuka	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	15		10.000.000
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Larantuka	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	5	30.000.000		Pengelolaan Data Kepegawaian	Larantuka	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	5		30.000.000
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN				540.000.000		Mutasi dan Promosi					540.000.000
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Lrtk, Kupang	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	4	30.000.000		Pengelolaan Mutasi ASN	Lrtk, Kupang	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	4		30.000.000
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Lrtk, Kupang	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	4	110.000.000		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Lrtk, Kupang	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	4		110.000.000
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Lrtk, Kupang, Jakarta	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	3	400.000.000		Pengelolaan Promosi ASN	Lrtk, Kupang, Jakarta	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	3		400.000.000
5	03	02	2.03		Pengembangan				285.000.000		Pengembangan					285.000.000
5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Larantuka, Kupang	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	2	40.000.000		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Larantuka, Kupang	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	2		40.000.000
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	100	120.000.000		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	100		120.000.000
5	03	02	2.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (Penyetaraan)	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN (Orang)	100	100.000.000		Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (Penyetaraan)	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN (Orang)	100		100.000.000

5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja Sama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Larantuka, Kupang, Surabaya	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja sama (Dokumen)	4	1.328.000.000		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja Sama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Larantuka, Kupang, Surabaya	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja sama (Dokumen)	2	1.328.000.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat telah dirangkum dari hasil musrenbang kecamatan tahun 2022. Usulan program dan kegiatan pada musrenbang kecamatan pada 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Flores Timur sebagian besar merupakan kebutuhan masyarakat pada wilayahnya masing-masing yang sesuai juga dengan tugas pokok dan fungsi Masing-masing OPD, Namun untuk OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tidak ada Usulan program /kegiatan dari masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, bersinergi, holistik dan terintegrasi perlu adanya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Pemerintah Daerah bersifat terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Sinergitas Pembangunan Nasional dan Daerah harus dioptimalkan untuk mendukung Pencapaian Visi dan Misi RPJMN, Pemerintah telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi pelaksanaan Pembangunan yang mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Untuk mendukung 5 (lima) arahan pemerintah tersebut an memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan nasional tahun 2023, pemerintah menetapkan tema RKP Tahun 2023 yaitu :” Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Tema Pembangunan tersebut dilaksanakan dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional yakni (1) Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemeratan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun Lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dan (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tema pada pada point 3 diatas ini memiliki korelasi manakala dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDMD Kabupaten Flores Timur sebagai leading sektor pengelolaan kepegawaian daerah. Isu nasional Pengadaan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diharapkan dapat membantu dan memperkuat SDM di kabuaptan Flores Timur, yang mana menjadi salah satu fokus pekerjaan BKPSDMD pada tahun 2023 berdasarkan sasaran strategis jangka menengah yang termuat pada rencana strategis BKPSDMD Kabupaten

Flores Timur Tahun 2023-2026 adalah meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada perangkat daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

Sebagai Tahun Pertama pelaksanaan RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 RPKD Kabupaten Flores Timur tahun 2023 diarahkan untuk pencapaian Sasaran tahun pertama dari setiap tujuan Flores timur Tahun 2023-2026. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah berperan pada Tujuan /sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Sasaran Persentase ASN yang memenuhi Kualifikasi jabatan yang dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel III.2

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi Kualifikasi Jabatan (%)

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2023 tersebut maka dirumuskan program dan kegiatan Prioritas Tahun 2023 yang dapat dilihat pada Tabel III.3 berikut.

Tabel III.3. Perumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Flores Timur

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2023 (Tahun Rencana)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5-3	5-4	0-0	0-0	01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH				1.428.000.000				700.000.000
5	04				Pendidikan dan Pelatihan				1.428.000.000				700.000.000
5	04	02			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN		14,68	1.428.000.000			18,45	700.000.000
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				1.428.000.000				700.000.000
5	04	02	2.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	Larantuka, Kupang	75	100.000.000	APBD II (DAU)		35	50.000.000
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja Sama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja sama (Dokumen)	Larantuka, Kupang, Surabaya	2	1.328.000.000	APBD II (DAU)		2	650.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis BKPSDMD yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi BKPSDMD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diserahkan pada Daerah, maka untuk pencapaian tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan Daerah sebagaimana diuraikan pada Bab III dan dirumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 terdapat pada tabel IV.1 sebagai berikut :

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5-3	5-4	0-0	0-0	01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH			6.616.128.048						5.530.291.987
x	xx				Program Penunjang Urusan			3.668.128.048						3.640.291.987
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupante/Kota	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	3.668.128.048				PP	100	3.640.291.987
						Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100						100	
						Presentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100						100	
						Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100						100	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)	7	107.500.000				PP	7	107.500.000
x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	15.000.000
x	xx	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	15.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	15.000.000
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7	60.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)			7	60.000.000

x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah (Laporan)	5			APBD II (DAU)		5	17.500.000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)	26	3.037.550.000			PP	26	3.037.550.000
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3	2.988.050.000	Larantuka	APBD II (DAU)		14	2.988.050.000
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	37.500.000	Larantuka	APBD II (DAU)		12	37.500.000
x	xx	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	12.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)		17	12.000.000
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1	20.000.000			PP	1	20.000.000
x	xx	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	10.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)		1	10.000.000
x	xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	10.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)		2	10.000.000
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki kesesuai Kompetensi	3	90.000.000			PP	3	90.000.000
x	xx	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai(Dokumen)	3	30.000.000	Dalam Daerah	APBD II (DAU)		3	30.000.000
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yg mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	30.000.000	Denpasar	APBD II (DAU)		2	30.000.000

					Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)				APBD II (DAU)		2	30.000.000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	38	216.800.000			PP	38	216.800.000
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	1	5.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)		1	5.000.000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	2	35.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)		2	35.000.000
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga (Paket)	2	15.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)		2	15.000.000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	1	30.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)		1	30.000.000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	2	30.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)		2	30.000.000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Dokumen)	2	1.800.000	Larantuka	APBD II (DAU)		2	1.800.000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)		12	15.000.000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	70.000.000	Dalam dan Luar Daerah	APBD II (DAU)		12	70.000.000
x	xx	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4	15.000.000	Dalam dan Luar Daerah	APBD II (DAU)		4	15.000.000
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	25	115.000.000			PP	15	90.000.000
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan (Unit)	25	30.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)		2	25.000.000
x	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	2	20.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)		-	20.000.000

						yang disediakan (Unit)	1			APBD II (DAU)		4	-
x	xx	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	25.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)		4	25.000.000
x	xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	20.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)		-	20.000.000
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		36	43.300.000				36	43.300.000
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12	2.700.000	Larantuka	APBD II (DAU)		12	2.700.000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan)	12	31.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)		12	31.000.000
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	9.600.000	Larantuka	APBD II (DAU)		12	9.600.000
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		37.978.048					35.141.987
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	13.978.048	Larantuka	APBD II (DAU)		6	14.141.987
x	xx	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara (Unit)	20	3.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)		10	2.000.000
x	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	2	3.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)		1	2.000.000
x	xx	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara (Unit)	1	3.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)		1	2.000.000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000	Larantuka	APBD II (DAU)		1	5.000.000

						Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)			100.000.000	Larantuka, Kupang, Jakarta	APBD II (DAU)			300	300.000.000
5	03	02	2.03			Pengembangan Kompetensi ASN			285.000.000				PU		200.000.000
5	03	02	2.03	03		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	2	40.000.000	Larantuka, Kupang	APBD II (DAU)			2	40.000.000
5	03	02	2.03	04		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	100	120.000.000	Dalam dan Luar Daerah	APBD II (DAU)			100	110.000.000
5	03	02	2.03	10		Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (Penyetaraan)	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN (Orang)	100	100.000.000	Dalam dan Luar Daerah	APBD II (DAU)			50	50.000.000
5	03	02	2.03	12		Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN (Dokumen)	2	25.000.000	19 kec	APBD II (DAU)				-
5	03	02	2.04			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			150.000.000				PU		105.000.000
5	03	02	2.04	02		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	2	55.000.000	Larantuka, Kupang	APBD II (DAU)			2	35.000.000
5	03	02	2.04	04		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan (Orang)	20	45.000.000	Larantuka, Kupang, Jakarta	APBD II (DAU)			20	35.000.000
5	03	02	2.04	08		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	20	50.000.000	Larantuka, Kupang	APBD II (DAU)			20	35.000.000
5	04					Pendidikan dan Pelatihan			1.428.000.000						700.000.000
5	04	02				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN	14,68	1.428.000.000				PU	18,45	700.000.000
5	04	02	2.02			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			1.428.000.000				PU		700.000.000
5	04	02	2.02	03		Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	75	100.000.000	Larantuka, Kupang	APBD II (DAU)			35	50.000.000

5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja Sama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja sama (Dokumen)	2	1.328.000.000	Larantuka, Kupang, Surabaya	APBD II (DAU)			2	650.000.000
---	----	----	------	----	--	---	---	---------------	-----------------------------	---------------	--	--	---	-------------

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Rencana 2023 disusun dengan berpedoman kepada RPJMN, RPJP Provinsi, RKPD Provinsi, RPJMPD Kabupaten, RPD Kabupaten, RKPD Kabupaten Flores Timur, Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur. Renja tersebut selanjutnya dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 memperhatikan Kaidah-Kaidah Pelaksanaan sebagai berikut :

1. Memperhatikan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Tahun lalu
2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
3. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai
4. Memperhatikan keberlanjutan dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat Perangkat Daerah, sebagai wujud nyata dan tanggungjawab Pemerintah dalam membangun daerah.

Dengan memperhatikan perihal diatas, maka rencana tindak lanjut (sebagai langkah proaktif) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur yang dapat dilaksanakan ke depan adalah :
Meningkatkan kualitas pelayanan dengan penataan administrasi umum, perencanaan serta peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Flores Timur serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Larantuka, Oktober 2022

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Flores Timur,



Rufus Kola Teluma, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19690725 199703 1 005